

**RENCANA KERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dapat tersusun. Adanya Renja ini maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan Kabupaten Ketapang serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Renja disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 serta bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja juga berperan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Ketapang, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Ketapang



(Drs. MARWANNOR, MM)  
NIP.19670427 200003 1 003

# DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum.....  | 2          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 4          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 5          |
| <b>BAB II      HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN<br/>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU.....</b>                                  | <b>7</b>   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten<br>Ketapang..... | 7          |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....                                   | 21         |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman<br>Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....           | 24         |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....   | 26         |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....  | 34         |
| <b>BAB III     TUJUAN DAN sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br/>Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KETAPANG .....</b>                           | <b>37</b>  |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....  | 37         |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....                                     | 37         |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....   | 38         |
| <b>BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas Penanaman Modal dan<br/>Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KETAPANG .....</b>                   | <b>45</b>  |
| <b>BAB V      PENUTUP.....</b>  | <b>60</b>  |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....                                      | 10 |
| Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023.....   | 18 |
| Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan g Sampai Dengan Tahun 2023.....   | 23 |
| Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang .....  | 28 |
| Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KetapangDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapan..... | 34 |
| Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 .....   | 38 |
| Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....   | 46 |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah ..... 2

[No table of figures entries found.](#)

[No table of figures entries found.](#)

# **BAB I**

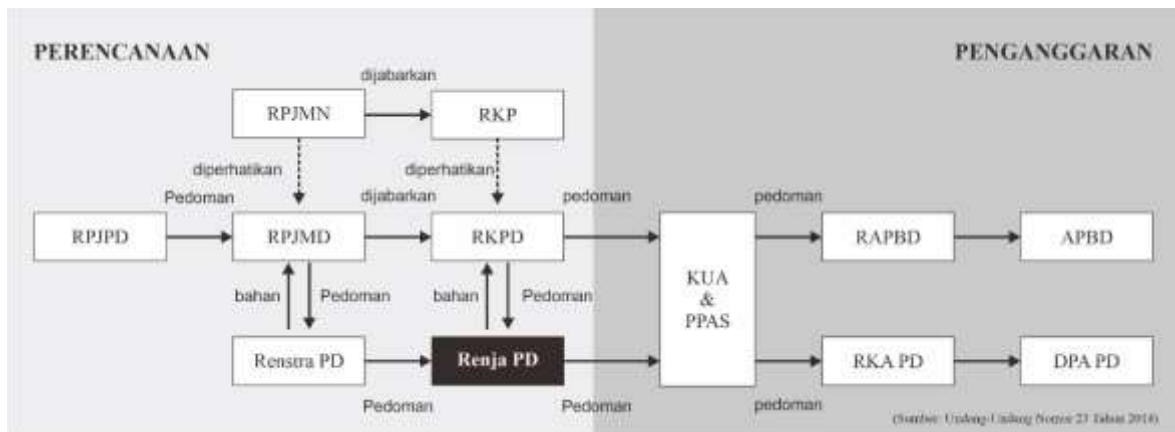
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkit Daerah**

Dalam Gambar 1.1. di atas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja mempedomani Renstra Perangkit Daerah (PD), untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95); dan
- l. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Ketapang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025.

## BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang disusun berdampak terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melaksanakan sebanyak 6 ( enam ) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 13.390.624.600,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 12.149.082.339,00 atau sebesar 90,73 persen.

##### **2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang:
- 1) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (Satu) Urusan Wajib, 6 (enam) Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program serta 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan serta 40 ( empat puluh ) Sub Kegiatan dengan 40 (empat puluh ) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
  - 2) Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program, terdapat 0 ( nol ) indikator yang melampaui target, 6 (enam) indikator sesuai target, serta 0 ( nol ) indikator tidak memenuhi target.
- b. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (Satu) urusan, 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kegiatan.
  - 2) Dari 6 (enam) indikator kinerja program, terdapat 0 (nol) indikator yang dapat melampaui target, dan 6 (enam) Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.
  - 3) Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, dan 0 (nol) indikator tidak dapat memenuhi Renstra.
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- 1) Sistem Pengadaan atau Penyediaan Barang yang menggunakan aplikasi Ekatalog yang tidak sinkron dengan SIPD dalam hal Penetapan SSH dan koefisien sehingga sisa anggaran tidak dapat digeser atau diubah pada saat Perubahan.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- 1) Anggaran tidak dapat diserap 100 %
  - 2) Sisa anggaran yang tidak diserap 100 % akan menjadi Silpa.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan.

- 1) Agar para pihak pengelola perencanaan ( bappeda ), Penganggaran ( BPKAD ) dan Pengadaan ( LPSE ) satu kata dalam hal menetapkan SSH dan Koefisien dalam aplikasi SIPD RI.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KETAPANG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2022 | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
|      |   |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2024)                   | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
|      | 1   | 2  | 3                                      | 4   | 5  | 6   | 7 (6/5)               | 8   | 9=(4+6+8)  | 10=(9/3)                                     |
| 2    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASR</b> |  |  |   |  |   |                       |   |  |  |
| 2.18 | <b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                    |  | <b>45.117.710.533,00</b>               | <b>6.929.818.907,00</b>   | <b>13.595.394.600,00</b>   | <b>12.364.516.485,00</b>                      | <b>90,95</b>          | <b>12.053.424.600,00</b>  | <b>31.347.759.992,00</b>   | <b>69,48</b>                                 |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                         | <b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>                   | <b>30.201.900.000,00</b>               | <b>5.011.991.272,00</b>   | <b>9.640.322.600,00</b>  | <b>8.576.290.891,00</b>                       | <b>88,96</b>          | <b>6.545.902.600,00</b>   | <b>20.134.184.763,00</b>   | <b>66,67</b>                                 |
|      | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>                            | <b>389.000.000,00</b>                  | <b>102.546.844,00</b>   | <b>77.000.000,00</b>   | <b>72.937.391,00</b>                          | <b>94,72</b>          | <b>76.000.000,00</b>  | <b>251.484.235,00</b>  | <b>64,65</b>                                 |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 42.000.000,00                          | 7.900.966,00  | 8.000.000,00   | 7.348.417,00                                  | 91,86                 | 8.000.000,00  | 23.249.383,00  | 55,36  |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-                         | 16.000.000,00                          | 2.981.010,00  | 3.000.000,00   | 2.733.184,00                                  | 91,11                 | 3.000.000,00  | 8.714.194,00   | 54,46  |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | -                                      | 0   | -  | -   | 0,00                  | -   | -  | #DIV/0!                                      |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 16.000.000,00                          | 2.970.328,00  | 3.000.000,00   | 2.566.260,00                                  | 85,54                 | 3.000.000,00  | 8.536.588,00   | 53,35  |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 11.000.000,00                          | 1.964.990,00  | 2.000.000,00   | 1.765.250,00                                  | 88,26                 | 2.000.000,00  | 5.730.240,00   | 52,09  |
|      |   |  |  |   |  |   |                       |   |  | <b>10</b>                                    |

|   |  |                          |                         |                         |                         |              |                         |                          |              |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 130.000.000,00           | 23.828.700,00           | 25.000.000,00           | 22.959.650,00           | 91,84        | 25.000.000,00           | 71.788.350,00            | 55,22        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 174.000.000,00           | 62.900.850,00           | 36.000.000,00           | 35.564.630,00           | 98,79        | 35.000.000,00           | 133.465.480,00           | 76,70        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>  | <b>22.094.000.000,00</b> | <b>3.644.942.635,00</b> | <b>4.549.502.600,00</b> | <b>3.771.148.511,00</b> | <b>82,89</b> | <b>4.533.502.600,00</b> | <b>11.949.593.746,00</b> | <b>54,09</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 22.010.000.000,00        | 3.635.033.073,00        | 4.533.502.600,00        | 3.756.550.596,00        | 82,86        | 4.517.502.600,00        | 11.909.086.269,00        | 54,11        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | -                        | 0                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | -                        | #DIV/0!      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 42.000.000,00            | 4.999.844,00            | 8.000.000,00            | 7.540.500,00            | 94,26        | 8.000.000,00            | 20.540.344,00            | 48,91        |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | -                        | 0                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | -                        | #DIV/0!      |
| Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD               | 42.000.000,00            | 4.909.718,00            | 8.000.000,00            | 7.057.415,00            | 88,22        | 8.000.000,00            | 19.967.133,00            | 47,54        |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | -                        | 0                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | -                        | #DIV/0!      |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>697.000.000,00</b>    | <b>49.999.500,00</b>    | <b>223.200.000,00</b>   | <b>204.859.348,00</b>   | <b>91,78</b> | <b>35.000.000,00</b>    | <b>289.858.848,00</b>    | <b>41,59</b> |

|   |  |                         |                       |                         |                         |              |                       |                         |               |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                          | 7.000.000,00            | 3.000.000,00          | -                       | -                       | #DIV/0!      | -                     | 3.000.000,00            | 42,86         |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | 45.000.000,00           | 22.000.000,00         | 75.000.000,00           | 75.000.000,00           | 100,00       | -                     | 97.000.000,00           | 215,56        |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 25.000.000,00           | 4.999.500,00          | 5.000.000,00            | 4.987.061,00            | 99,74        | 5.000.000,00          | 14.986.561,00           | 59,95         |
| Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 400.000.000,00          | 0                     | 63.079.000,00           | 63.049.200,00           | 99,95        | -                     | 63.049.200,00           | 0,00          |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 220.000.000,00          | 20.000.000,00         | 80.121.000,00           | 61.823.087,00           | 77,16        | 30.000.000,00         | 111.823.087,00          | 50,83         |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                       | <b>1.755.000.000,00</b> | <b>467.786.532,00</b> | <b>933.097.750,00</b>   | <b>931.192.519,00</b>   | <b>99,80</b> | <b>535.000.000,00</b> | <b>1.933.979.051,00</b> | <b>110,20</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 35.000.000,00           | 17.000.000,00         | 10.000.000,00           | 9.983.890,00            | 99,84        | 15.000.000,00         | 41.983.890,00           | 119,95        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 720.000.000,00          | 138.947.063,00        | 363.097.750,00          | 363.015.515,00          | 99,98        | 95.025.000,00         | 596.987.578,00          | 0,00          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 100.000.000,00          | 49.999.690,00         | 210.000.000,00          | 209.999.655,00          | 100,00       | 174.975.000,00        | 434.974.345,00          | 434,97        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | -                       | 0                     | -                       | -                       | 0,00         | -                     | -                       | #DIV/0!       |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 900.000.000,00          | 261.839.779,00        | 350.000.000,00          | 348.193.459,00          | 99,48        | 250.000.000,00        | 860.033.238,00          | 95,56         |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>     | <b>2.180.000.000,00</b> | <b>216.986.972,00</b> | <b>2.260.133.850,00</b> | <b>2.202.812.250,00</b> | <b>97,46</b> | <b>304.700.000,00</b> | <b>2.724.499.222,00</b> | <b>124,98</b> |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 950.000.000,00          | 0                     | -                       | -                       | 0,00         | -                     | -                       | 0,00          |

|  |   |  |                         |                       |                       |                       |              |                       |                         |               |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 30.000.000,00           | 62.856.000,00         | 696.000.000,00        | 687.526.000,00        | 98,78        | 60.000.000,00         | 810.382.000,00          | 2701,27       |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 950.000.000,00          | 126.007.422,00        | 323.531.600,00        | 313.860.000,00        | 97,01        | 136.035.078,00        | 575.902.500,00          | 60,62         |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 250.000.000,00          | 28.123.550,00         | 1.240.602.250,00      | 1.201.426.250,00      | 96,84        | 108.664.922,00        | 1.338.214.722,00        | 535,29        |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                   | <b>2.195.000.000,00</b> | <b>370.975.548,00</b> | <b>892.400.000,00</b> | <b>716.685.452,00</b> | <b>80,31</b> | <b>503.400.000,00</b> | <b>1.591.061.000,00</b> | <b>72,49</b>  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 25.000.000,00           | 4.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 100,00       | 3.000.000,00          | 12.000.000,00           | 48,00         |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 640.000.000,00          | 116.975.548,00        | 595.000.000,00        | 426.085.452,00        | 71,61        | 200.000.000,00        | 743.061.000,00          | 116,10        |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1.530.000.000,00        | 250.000.000,00        | 292.400.000,00        | 285.600.000,00        | 97,67        | 300.400.000,00        | 836.000.000,00          | 54,64         |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  | <b>891.900.000,00</b>   | <b>158.753.241,00</b> | <b>704.988.400,00</b> | <b>676.655.420,00</b> | <b>95,98</b> | <b>558.300.000,00</b> | <b>1.393.708.661,00</b> | <b>156,26</b> |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 240.000.000,00          | 54.942.641,00         | 154.668.400,00        | 132.619.358,00        | 85,74        | 100.000.000,00        | 287.561.999,00          | 119,82        |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26.900.000,00           | 3.886.600,00          | 3.900.000,00          | 3.103.100,00          | 79,57        | 4.000.000,00          | 10.989.700,00           | 0,00          |

|  |   |  |                         |                       |                       |                       |              |                       |                         |               |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                   | 500.000.000,00          | 79.924.000,00         | 521.420.000,00        | 519.463.462,00        | 99,62        | 430.300.000,00        | 1.029.687.462,00        | 205,94        |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi                  | 75.000.000,00           | 10.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 100,00       | 15.000.000,00         | 40.000.000,00           | 0,00          |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 50.000.000,00           | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 6.469.500,00          | 64,70        | 9.000.000,00          | 25.469.500,00           | 0,00          |
|  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>                                   | <b>1.740.580.808,00</b> | <b>282.059.040,00</b> | <b>801.732.000,00</b> | <b>761.855.179,00</b> | <b>95,03</b> | <b>297.166.000,00</b> | <b>1.341.080.219,00</b> | <b>100,66</b> |
|  | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>                       | <b>650.580.808,00</b>   | <b>70.132.460,00</b>  | <b>111.552.000,00</b> | <b>84.716.700,00</b>  | <b>75,94</b> | <b>89.000.000,00</b>  | <b>243.849.160,00</b>   |               |
|  | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal          | 329.414.080,00          | 45.945.500,00         | 60.000.000,00         | 57.810.560,00         | 96,35        | 89.000.000,00         | 192.756.060,00          | 58,51         |
|  | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah          | 321.166.728,00          | 24.186.960,00         | 51.552.000,00         | 26.906.140,00         | 52,19        | -                     | 101.093.100,00          | 31,48         |
|  | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten / Kota   | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar ( PMA/PMDN ) dengan UMKM di daerah                              |                         |                       |                       |                       |              | 50.000.000,00         |                         |               |
|  | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>   | <b>1.090.000.000,00</b> | <b>211.926.580,00</b> | <b>690.180.000,00</b> | <b>677.138.479,00</b> | <b>98,11</b> | <b>208.166.000,00</b> | <b>1.097.231.059,00</b> | <b>100,66</b> |

|  |   |                         |                       |                         |                         |              |                         |                         |              |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota  | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota      | 520.000.000,00          | 110.617.630,00        | 427.350.000,00          | 418.938.736,00          | 98,03        | 128.166.000,00          | 657.722.366,00          | 126,49       |
| Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                            | 570.000.000,00          | 101.308.950,00        | 262.830.000,00          | 258.199.743,00          | 98,24        | 80.000.000,00           | 439.508.693,00          | 77,11        |
| <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>          | <b>6.285.430.694,00</b> | <b>330.505.635,00</b> | <b>1.526.790.000,00</b> | <b>1.505.134.429,00</b> | <b>98,58</b> | <b>3.901.834.000,00</b> | <b>5.737.474.064,00</b> | <b>91,28</b> |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>                                 | <b>6.285.430.694,00</b> | 330.505.635,00        | 1.526.790.000,00        | 1.505.134.429,00        | 98,58        | 3.901.834.000,00        | 5.737.474.064,00        | 91,28        |
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota | 1.120.000.000,00        | 55.046.420,00         | 110.000.000,00          | 105.073.557,00          | 95,52        | 151.834.000,00          | 311.953.977,00          | 27,85        |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota                    | 5.165.430.694,00        | 275.459.215,00        | 1.416.790.000,00        | 1.400.060.872,00        | 0,00         | 3.750.000.000,00        | 5.425.520.087,00        | 105,04       |
| <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>             | <b>3.988.831.018,00</b> | <b>489.615.106,00</b> | <b>596.890.000,00</b>   | <b>595.845.416,00</b>   | <b>99,82</b> | <b>300.000.000,00</b>   | <b>1.385.460.522,00</b> | <b>34,73</b> |
| <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu</b>         | <b>3.988.831.018,00</b> | <b>489.615.106,00</b> | <b>596.890.000,00</b>   | <b>595.845.416,00</b>   | <b>99,82</b> | <b>300.000.000,00</b>   | <b>1.385.460.522,00</b> | <b>34,73</b> |

|  |  |                  |                |                |                |       |                |                |       |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                     | 1.773.031.018,00 | 319.615.106,00 | 240.890.000,00 | 239.927.116,00 | 99,60 | -              | 709.542.222,00 | 40,02 |
| Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik             | Jumlah Pelaku Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik   |                  |                |                |                |       | 150.000.000,00 |                |       |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal   | 1.230.000.000,00 | 170.000.000,00 | 215.000.000,00 | 214.946.000,00 | 99,97 | -              | 534.946.000,00 | 43,49 |
| Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha |                  |                |                |                |       | 150.000.000,00 |                |       |
| Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan   | 795.800.000,00   | -              | 141.000.000,00 | 140.972.300,00 | 99,98 | -              | 240.972.300,00 | 30,28 |
| Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik   |                  |                |                |                |       | 100.000.000,00 |                |       |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota  | 190.000.000,00   | -              | 176.000.000,00 | 155.475.649,00 | 88,34 | 30.000.000,00  | 185.475.649,00 | 97,62 |

|  |  |  |                         |                       |                       |                       |              |                       |                         |               |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>   | <b>2.175.726.010,00</b> | <b>693.940.722,00</b> | <b>895.680.000,00</b> | <b>797.504.354,00</b> | <b>89,04</b> | <b>818.522.000,00</b> | <b>2.309.967.076,00</b> | <b>106,17</b> |
|  |  | <b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>  |                         |                       |                       |                       |              |                       | -                       |               |
|  | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>   | <b>2.175.726.010,00</b> | <b>639.342.361,00</b> | <b>793.740.000,00</b> | <b>699.392.217,00</b> | <b>88,11</b> | <b>686.106.000,00</b> | <b>2.024.840.578,00</b> | <b>93,07</b>  |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  | 520.726.010,00          | 54.598.361,00         | 101.940.000,00        | 98.112.137,00         | 96,24        | 132.416.000,00        | 285.126.498,00          | 54,76         |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | 825.000.000,00          | 397.937.000,00        | 511.678.000,00        | 445.895.320,00        | 87,14        | 328.859.000,00        | 1.172.691.320,00        | 142,14        |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan  | 830.000.000,00          | 186.807.000,00        | 180.122.000,00        | 155.384.760,00        | 86,27        | 224.831.000,00        | 567.022.760,00          | 68,32         |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>   | <b>725.242.003,00</b>   | <b>121.707.132,00</b> | <b>133.980.000,00</b> | <b>127.886.216,00</b> | <b>95,45</b> | <b>90.000.000,00</b>  | <b>339.593.348,00</b>   | <b>46,82</b>  |
|  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>                                    | <b>725.242.003,00</b>   | <b>121.707.132,00</b> | <b>133.980.000,00</b> | <b>127.886.216,00</b> | <b>95,45</b> | <b>90.000.000,00</b>  | <b>339.593.348,00</b>   | <b>46,82</b>  |
|  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 725.242.003,00          | 121.707.132,00        | 133.980.000,00        | 127.886.216,00        | 95,45        | 90.000.000,00         | 339.593.348,00          | 46,82         |

### 2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023**

| Kode                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran (Rp)           | Realisasi Anggaran (Rp) | Persen (%)   |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                        | 2  | 3                       | 4                       | 5            |
| <b>2.18.2.18.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                 | <b>9.624.322.600,00</b> | <b>8.561.692.976,00</b> | <b>88,96</b> |
| <b>2.18.2.18.01.2.01</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | <b>77.000.000,00</b>    | <b>72.937.391,00</b>    | <b>94,72</b> |
| 2.18.2.18.01.2.01.01     | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 8.000.000,00            | 7.348.417,00            | 91,86        |
| 2.18.2.18.01.2.01.02     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 3.000.000,00            | 2.733.184,00            | 91,11        |
| 2.18.2.18.01.2.01.04     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 3.000.000,00            | 2.566.260,00            | 85,54        |
| 2.18.2.18.01.2.01.05     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 2.000.000,00            | 1.765.250,00            | 88,26        |
| 2.18.2.18.01.2.01.06     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.000.000,00           | 22.959.650,00           | 91,84        |
| 2.18.2.18.01.2.01.07     | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 36.000.000,00           | 35.564.630,00           | 98,79        |
| <b>2.18.2.18.01.2.02</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>4.533.502.600,00</b> | <b>3.756.550.596,00</b> | <b>82,86</b> |
| 2.18.2.18.01.2.02.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.517.502.600,00        | 3.741.952.681,00        | 82,83        |
| 2.18.2.18.01.2.02.05     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 8.000.000,00            | 7.540.500,00            | 94,26        |
| 2.18.2.18.01.2.02.07     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD          | 8.000.000,00            | 7.057.415,00            | 88,22        |
| <b>2.18.2.18.01.2.05</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>223.200.000,00</b>   | <b>204.859.348,00</b>   | <b>91,78</b> |
| 2.18.2.18.01.2.05.02     | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 75.000.000,00           | 75.000.000,00           | 100,00       |
| 2.18.2.18.01.2.05.03     | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 5.000.000,00            | 4.987.061,00            | 99,74        |
| 2.18.2.18.01.2.05.10     | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | 63.079.000,00           | 63.049.200,00           | 99,95        |
| 2.18.2.18.01.2.05.11     | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-                                    | 80.121.000,00           | 61.823.087,00           | 77,16        |

| Kode                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran (Rp)           | Realisasi Anggaran (Rp) | Persen (%)   |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                             | 2  | 3                       | 4                       | 5            |
|                               | undangan   |                         |                         |              |
| <b>2.18.2.18.0<br/>1.2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>933.097.750,00</b>   | <b>931.192.519,00</b>   | <b>99,80</b> |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.06.01      | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 10.000.000,00           | 9.983.890,00            | 99,84        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.06.04      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 363.097.750,00          | 363.015.515,00          | 99,98        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.06.05      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 210.000.000,00          | 209.999.655,00          | 100,00       |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.06.09      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 350.000.000,00          | 348.193.459,00          | 99,48        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>1.2.07</b> | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>2.260.133.850,00</b> | <b>2.202.812.250,00</b> | <b>97,46</b> |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.07.05      | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel   | 696.000.000,00          | 687.526.000,00          | 98,78        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.07.10      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 323.531.600,00          | 313.860.000,00          | 97,01        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.07.11      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 1.240.602.250,00        | 1.201.426.250,00        | 96,84        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>1.2.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>892.400.000,00</b>   | <b>716.685.452,00</b>   | <b>80,31</b> |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.08.01      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 100,00       |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.08.02      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik   | 595.000.000,00          | 426.085.452,00          | 71,61        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.08.04      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 292.400.000,00          | 285.600.000,00          | 97,67        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>1.2.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>704.988.400,00</b>   | <b>676.655.420,00</b>   | <b>95,98</b> |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.09.01      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 154.668.400,00          | 132.619.358,00          | 85,74        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.09.02      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 3.900.000,00            | 3.103.100,00            | 79,57        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.09.09      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 521.420.000,00          | 519.463.462,00          | 99,62        |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.09.10      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 15.000.0000,00          | 15.000.000,00           | 100,00       |
| 2.18.2.18.0<br>1.2.09.11      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 10.000.000,00           | 6.469.500,00            | 64,70        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>2</b>      | <b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>  | <b>538.902.000,00</b>   | <b>503.655.436,00</b>   | <b>93,46</b> |

| Kode                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran (Rp)           | Realisasi Anggaran (Rp) | Persen (%)   |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                             | 2   | 3                       | 4                       | 5            |
| <b>2.18.2.18.0<br/>2.2.01</b> | <b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>111.552.000,00</b>   | <b>84.716.700,00</b>    | <b>75,94</b> |
| 2.18.2.18.0<br>2.2.01.01      | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | 60.000.000,00           | 57.810.560,00           | 96,35        |
| 2.18.2.18.0<br>2.2.01.02      | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | 51.552.000,00           | 26.906.140,00           | 52,19        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>2.2.02</b> | <b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>427.350.000,00</b>   | <b>418.938.736,00</b>   | <b>98,03</b> |
| 2.18.2.18.0<br>2.2.02.01      | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | 164.520.000,00          | 160.738.993,00          | 97,70        |
| 2.18.2.18.0<br>2.2.02.02      | Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | 262.830.000,00          | 258.199.743,00          | 98,24        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>3</b>      | <b>Program Promosi Penanaman Modal</b>  | <b>1.526.790.000,00</b> | <b>1.505.134.429,00</b> | <b>98,58</b> |
| <b>2.18.2.18.0<br/>3.2.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>1.526.790.000,00</b> | <b>1.505.134.429,00</b> | <b>98,58</b> |
| 2.18.2.18.0<br>3.2.01.01      | Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | 110.000.000,00          | 105.073.557,00          | 95,52        |
| 2.18.2.18.0<br>3.2.01.02      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | 1.416.790.000,00        | 1.400.060.872,00        | 98,82        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>4</b>      | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>  | <b>772.890.000,00</b>   | <b>751.321.065,00</b>   | <b>97,21</b> |
| <b>2.18.2.18.0<br/>4.2.01</b> | <b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>772.890.000,00</b>   | <b>751.321.065,00</b>   | <b>97,21</b> |
| 2.18.2.18.0<br>4.2.01.01      | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik       | 240.890.000,00          | 239.927.116,00          | 99,60        |
| 2.18.2.18.0<br>4.2.01.02      | Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | 215.000.000,00          | 214.946.000,00          | 99,97        |
| 2.18.2.18.0<br>4.2.01.03      | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                  | 141.000.000,00          | 140.972.300,00          | 99,98        |
| 2.18.2.18.0<br>4.2.01.04      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | 176.000.000,00          | 155.475.649,00          | 88,34        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>5</b>      | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>   | <b>793.740.000,00</b>   | <b>699.392.217,00</b>   | <b>88,11</b> |
| <b>2.18.2.18.0<br/>5.2.01</b> | <b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>793.740.000,00</b>   | <b>699.392.217,00</b>   | <b>88,11</b> |

| Kode                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran (Rp)            | Realisasi Anggaran (Rp)  | Persen (%)   |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1                             | 2   | 3                        | 4                        | 5            |
| 2.18.2.18.0<br>5.2.01.01      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | 101.940.000,00           | 98.112.137,00            | 96,24        |
| 2.18.2.18.0<br>5.2.01.02      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | 511.678.000,00           | 445.895.320,00           | 87,14        |
| 2.18.2.18.0<br>5.2.01.03      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | 180.122.000,00           | 155.384.760,00           | 86,27        |
| <b>2.18.2.18.0<br/>6</b>      | <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>  | <b>133.980.000,00</b>    | <b>127.886.216,00</b>    | <b>95,45</b> |
| <b>2.18.2.18.0<br/>6.2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>133.980.000,00</b>    | <b>127.886.216,00</b>    | <b>95,45</b> |
| 2.18.2.18.0<br>6.2.01.01      | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 133.980.000,00           | 127.886.216,00           | 95,45        |
|                               |   |                          |                          |              |
|                               | <b>Jumlah</b>   | <b>13.390.624.600,00</b> | <b>12.149.082.339,00</b> | <b>90,73</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (Satu) urusan, 6 (Enam) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan serta 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebesar Rp 13.390.624.600,00 Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 12.149.082.339,00 (90,73 persen) dengan sisa sebesar Rp 1.241.542.261,00 (9,27 persen).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Ketapang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mengacu pada

indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Sampai Dengan Tahun 2023**

| No | Indikator   | SPM / Standar Nasional | IKK | `Target Renstra |      |      |      | Realisasi Kinerja |      | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|---|------------------------|-----|-----------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
|    |   |                        |     | 2023            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024 | 2025     | 2026 |                  |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11       | 12   | 13               |
| 1. | Persentase Peningkatan Realisasi PMA / PMDN             |                        |     | 2,05            | 2,75 | 3,45 | 4.15 | -13,43            | -    | 4        | 4,5  |                  |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan |                        |     | 95              | 96   | 97   | 98   | 99.66             | -    | 99       | 99,5 |                  |

Sumber: Data LKPM

Dari data Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2023 dapat dianalisis sebagai berikut.

- a. Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA Tahun 2023 mengalami Minus -13,43% hal ini dikarenakan Realisasi Investasi Pada Tahun 2023 lebih rendah atau menurun yaitu Rp. 7, 93 Trilyun dibandingkan Realisasi Investasi PMDN / PMA tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9,157 Trilyun. Turunnya nilai investasi pada tahun 2023 disebabkan laporan dari LKPM bahwa salah satu kegiatan proyek strategis nasional sudah dalam tahap operasional sedangkan pada tahun 2022 dalam tahap konstruksi sehingga nilai investasinya lebih besar.
- b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2023 sebesar 99,66 dari yang ditargetkan yaitu sebesar 95 yang berarti ada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penanaman modal adalah sebagai berikut.

- a. Belum sinkronnya regulasi yang dibuat oleh pusat dengan regulasi yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kabupaten, terkait dengan masih kurang sempurnanya system dan tumpeng tindih kewenangan.
- b. Kurangnya Sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait proses perizinan OSS RBA terhadap masyarakat luas di kabupaten Ketapang.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.
- d. Kurangnya pelatihan atau bimtek yang diikuti oleh tenaga pelayanan
- e. Fasilitas internet yang belum maksimal yang ada di kecamatan

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ., yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Bagaimana Mensinergikan regulasi yang dibuat oleh pusat dengan regulasi yang ada di daerah / kabupaten.
- 2) Bagaimana menyebarluaskan informasi kepada para pelaku usaha terkait proses perizinan OSS RBA
- 3) Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.
- 4) Kemajuan era digital dan teknologi harus diikuti dengan kemampuan dan skil SDM
- 5) Kondisi geografis yang luas dan jaringan internet yang belum memadai tetap mendapatkan pelayanan perizinan.
- 6) Mengubah pola pikir masyarakat yang sering beranggapan bahwa mengurus atau membuat izin usaha sangat rumit dan mahal.

b. Peluang

- 1) Kemudahan dalam mengakses perizinan yang dilakukan secara Online dengan Sistem OSS RBA.
- 2) Potensi usaha yang cukup banyak untuk dikembangkan di kabupaten
- 3) Adanya anggaran yang disiapkan untuk pengembangan kapasitas SDM
- 4) Pelaku usaha besar dapat menjadi mitra usaha bagi pelaku usaha kecil / UMKM.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan BKPM ( pusat ) terkait dengan regulasi yang diterbitkan dan kesesuaian dengan regulasi yang ada di daerah.
- b. Meningkatkan promosi investasi baik dengan mengikuti even secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik ( web site, IG, FB dll ).
- c. Melakukan sosialisasi tentang pelayanan perizinan berusaha secara berkelanjutan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun ke-keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 adalah **“Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Upaya Penguatan Perekonomian Daerah.”** dengan 5( lima ) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
- b. Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar
- c. Prioritas Daerah 3 : Memperkuat Produktivitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Perekonomian berbasis Potensi Daerah
- d. Prioritas Daerah 4 : Mewujudkan Pemenuhan Infrastuktur Penunjang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
- e. Prioritas Daerah 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE )
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )
- d. Tingkat Kemiskinan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,70 persen
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,3
- c. Angka kemiskinan sebesar 9,00 persen
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20 persen

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mendukung pencapaian prioritas 3 (tiga), yaitu ***“Memperkuat Produktivitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Perekonomian berbasis Potensi Daerah”***. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut.

**TABEL 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

|           | RANCANGAN AWAL RKPD   |  |          |                            |                           | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |  |          |                            |                           |
|-----------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------|
|           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja (%) | Pagu Indikatif (Rp. 000 ) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja (%) | Pagu Indikatif (Rp. 000 ) |
| 1         | 2   | 3  | 4        | 5                          | 6                         | 2   | 3  | 4        | 5                          | 6                         |
| <b>A</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                   | <b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>   | Ketapang | 100                        | 6.174.529,20              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                   | <b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>   | Ketapang | 100                        | 7.975.384,44              |
| <b>I</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>  | Ketapang | 100                        | 77.000,00                 | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>  | Ketapang | 100                        | 77.000,00                 |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Ketapang | 100                        | 8.000,00                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Ketapang | 100                        | 8.000,00                  |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 3.000,00                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 3.000,00                  |
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Ketapang | -                          | -                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Ketapang | -                          | -                         |
| 4         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 3.000,00                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 3.000,00                  |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 2.000,00                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Ketapang | 100                        | 2.000,00                  |
| 6         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ketapang | 100                        | 25.000,00                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ketapang | 100                        | 25.000,00                 |
| 7         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Ketapang | 100                        | 36.000,00                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Ketapang | 100                        | 36.000,00                 |
| <b>II</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>  | Ketapang | 100                        | 4.517.000,00              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>  | Ketapang | 100                        | 4.805.550,70              |
| 8         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Ketapang | 100                        | 4.500.000,00              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Ketapang | 100                        | 4.788.550,70              |

|     |  |  |          |     |                   |  |  |          |     |                   |
|-----|--|--|----------|-----|-------------------|--|--|----------|-----|-------------------|
| 9   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Ketapang | 0   | -                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Ketapang | 0   | -                 |
| 10  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                       | Ketapang | 100 | 8.500,00          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                       | Ketapang | 100 | 8.500,00          |
| 11  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Ketapang | 0   | -                 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Ketapang | 0   | -                 |
| 12  | Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Ketapang | 100 | 8.500,00          | Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Ketapang | 100 | 8.500,00          |
| 13  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Ketapang | 0   | -                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Ketapang | 0   | -                 |
| III | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Ketapang | 100 | <b>155.000,00</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Ketapang | 100 | <b>95.400,00</b>  |
| 14  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Ketapang | 0   | -                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Ketapang | 0   | -                 |
| 15  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | Ketapang | 0   | -                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | Ketapang | 0   | -                 |
| 16  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Ketapang | 100 | 5.000,00          | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Ketapang | 100 | 5.000,00          |
| 17  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Ketapang | 100 | 100.000,00        | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Ketapang | 100 | 40.400,00         |
| 18  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Ketapang | 100 | 50.000,00         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Ketapang | 100 | 50.000,00         |
| V   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Ketapang | 100 | <b>377.000,00</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Ketapang | 100 | <b>670.000,00</b> |
| 26  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Ketapang | 100 | 7.000,00          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Ketapang | 100 | 15.000,00         |
| 27  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Ketapang | 100 | 150.000,00        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Ketapang | 100 | 270.000,00        |
| 28  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Ketapang | 100 | 20.000,00         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Ketapang | 100 | 35.000,00         |
| 29  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Ketapang | 0   | -                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Ketapang | 0   | -                 |

|      |   |  |          |     |                   |   |  |          |     |                     |
|------|---|--|----------|-----|-------------------|---|--|----------|-----|---------------------|
| 30   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Ketapang | 100 | 200.000,00        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Ketapang | 100 | 350.000,00          |
| VI   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                     | Ketapang | 100 | <b>350.000,00</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                     | Ketapang | 100 | <b>1.150.000,00</b> |
| 31   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Ketapang | 100 | 150.000,00        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Ketapang | 100 | 650.000,00          |
| 32   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Ketapang | 0   | -                 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Ketapang | 0   | -                   |
| 33   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Ketapang | 100 | 150.000,00        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Ketapang | 100 | 400.000,00          |
| 34   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Ketapang | 100 | 50.000,00         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Ketapang | 100 | 100.000,00          |
| VII  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                   | Ketapang | 100 | <b>512.029,20</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                   | Ketapang | 100 | <b>638.433,74</b>   |
| 35   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Ketapang | 100 | 5.000,00          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Ketapang | 100 | 5.000,00            |
| 36   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Ketapang | 100 | 187.029,20        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Ketapang | 100 | 312.633,74          |
| 37   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Ketapang | 100 | 320.000,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Ketapang | 100 | 320.800,00          |
| VIII | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  | Ketapang | 100 | <b>186.500,00</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  | Ketapang | 100 | <b>539.000,00</b>   |
| 38   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Ketapang | 100 | 55.000,00         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Ketapang | 100 | 100.000,00          |
| 39   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Ketapang | 100 | 6.500,00          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Ketapang | 100 | 4.000,00            |
| 40   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Ketapang | 100 | 100.000,00        | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Ketapang | 100 | 400.000,00          |
| 41   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi              | Ketapang | 100 | 15.000,00         | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi              | Ketapang | 100 | 20.000,00           |

|           |   |  |          |     |                     |   |  |          |     |                     |
|-----------|---|--|----------|-----|---------------------|---|--|----------|-----|---------------------|
| 42        | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Ketapang | 100 | 10.000,00           | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Ketapang | 100 | 15.000,00           |
| <b>B</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>                                   | Ketapang | 100 | <b>374.543,77</b>   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>                                   | Ketapang | 100 | <b>260.593,07</b>   |
| <b>IX</b> | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>                       | Ketapang | 100 | <b>144.543,77</b>   | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>                       | Ketapang | 100 | <b>104.298,17</b>   |
| 43        | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal          | Ketapang | 100 | 70.000,00           | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal          | Ketapang | 100 | 49.754,40           |
| 44        | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota  | Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota                                | Ketapang | 100 | 74.543,77           | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota  | Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota                                | Ketapang | 100 | 54.543,77           |
| <b>X</b>  | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>   | Ketapang | 100 | <b>230.000,00</b>   | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>   | Ketapang | 100 | <b>156.294,90</b>   |
| 45        | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota                       | Ketapang | 100 | 110.000,00          | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota                       | Ketapang | 100 | 85.000,00           |
| 46        | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota  | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Ketapang | 100 | 120.000,00          | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota  | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Ketapang | 100 | 71.294,90           |
| <b>C</b>  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>                           | Ketapang | 100 | <b>1.352.519,17</b> | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>                           | Ketapang | 100 | <b>1.327.519,17</b> |
| <b>XI</b> | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>                            | <b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>  | Ketapang | 100 | <b>1.352.519,17</b> | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>                            | <b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>  | Ketapang | 100 | <b>1.327.519,17</b> |
| 47        | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal   | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota                  | Ketapang | 100 | 240.000,00          | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal   | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota                  | Ketapang | 100 | 295.000,00          |
| 48        | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota                                     | Ketapang | 100 | 1.112.519,17        | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota                                     | Ketapang | 100 | 1.032.519,17        |
| <b>D</b>  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>                              | Ketapang | 100 | <b>858.329,47</b>   | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>                              | Ketapang | 100 | <b>808.329,47</b>   |

|      |   |  |          |     |            |   |  |          |     |            |
|------|---|--|----------|-----|------------|---|--|----------|-----|------------|
| XII  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu   | Ketapang | 100 | 858.329,47 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu   | Ketapang | 100 | 808.329,47 |
| 49   | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik      | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Ketapang | 100 | 368.329,47 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik      | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Ketapang | 100 | 238.329,47 |
| 50   | Pemantauan, Analisis , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                          | Ketapang | 100 | 280.000,00 | Pemantauan, Analisis , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                          | Ketapang | 100 | 280.000,00 |
| 51   | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                    | Ketapang | 100 | 160.000,00 | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                    | Ketapang | 100 | 160.000,00 |
| 52   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                               | Ketapang | 100 | 50.000,00  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                               | Ketapang | 100 | 130.000,00 |
| E    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>   | Ketapang | 100 | 676.259,58 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>   | Ketapang | 100 | 438.179,71 |
|      |   | <b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>  | Ketapang | 0   | -          |   | <b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>  | Ketapang | 0   | -          |
| XIII | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota  | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | Ketapang | 100 | 676.259,58 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota  | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | Ketapang | 100 | 438.179,71 |

|     |  |  |          |     |                     |  |  |          |     |                      |
|-----|--|--|----------|-----|---------------------|--|--|----------|-----|----------------------|
| 53  | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya                                    | Ketapang | 100 | 130.000,00          | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya                                    | Ketapang | 100 | 98.179,71            |
| 54  | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis  | Ketapang | 100 | 325.000,00          | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis  | Ketapang | 100 | 170.000,00           |
| 55  | Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal  | Ketapang | 100 | 221.259,58          | Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal  | Ketapang | 100 | 170.000,00           |
| F   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>   | Ketapang | 100 | <b>156.059,90</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>   | Ketapang | 100 | <b>146.059,90</b>    |
| XIV | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>                                    | Ketapang | 100 | <b>156.059,90</b>   | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>                                    | Ketapang | 100 | <b>146.059,90</b>    |
| 56  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Ketapang | 100 | 156.059,90          | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Ketapang | 100 | 146.059,90           |
|     |  |  |          |     | <b>9.592.241,10</b> |  |  |          |     | <b>10.956.065,76</b> |

Ketapang 2024

Rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2024 sesuai/tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. (beri penjelasan tabel di atas)

Dari table diatas terdapat penambahan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan yang diproyeksi ada kenaikan dan ada penambahan anggaran pemeliharaan Gedung Kantor yang diperuntukkan untuk Gedung MPP sehingga dilakukan penyesuain kembali anggaran belanja pada beberap program/kegiatan dan sub kegiatan.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Ketapang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

| No  | Program / Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan Penting |
|-----|---|--------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                 | 5                | 6               |
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |        |                   |                  |                 |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |        |                   |                  |                 |
| 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |        |                   |                  |                 |
| 1.3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |        |                   |                  |                 |
| 1.4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |        |                   |                  |                 |
| 1.5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |        |                   |                  |                 |
| 1.6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |        |                   |                  |                 |

| No  | Program / Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan Penting |
|-----|--|--------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                 | 5                | 6               |
| 1.7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |        |                   |                  |                 |
|     |  |        |                   |                  |                 |
| 2.  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal   |        |                   |                  |                 |
| 2.1 | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                        |        |                   |                  |                 |
| 2.2 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   |        |                   |                  |                 |
|     |  |        |                   |                  |                 |
| 3.  | Program Promosi Penanaman Modal  |        |                   |                  |                 |
| 3.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |        |                   |                  |                 |
|     |  |        |                   |                  |                 |
| 4.  | Program Pelayanan Penanaman Modal  |        |                   |                  |                 |
| 4.1 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |        |                   |                  |                 |
|     |  |        |                   |                  |                 |
| 5.  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal   |        |                   |                  |                 |
| 5.1 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |        |                   |                  |                 |
|     |  |        |                   |                  |                 |
| 6.  | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  |        |                   |                  |                 |

| No  | Program / Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan Penting |
|-----|--|--------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                 | 5                | 6               |
| 6.1 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |        |                   |                  |                 |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KETAPANG**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Berdasarkan RPJMN BKPM 2020 -2024 ada 3 ( tiga ) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
- b. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha / Penanam Modal dan
- c. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tersebut, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025, yaitu:

**“Meningkatkan Realisasi Investasi PMDN / PMA .”**

dengan indikator tujuan **“ Nilai Investasi PMDN / PMA ”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yaitu **“1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, 2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021- 2026, yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025**

| Tujuan                                       | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran                              | Satuan | Target 2025 |
|--|---|--|--------|-------------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5           |
| Meningkatkan RFealisasi Investasi PMDN / PMA | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal                    | Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA            | Persen | 3,45        |
|  | Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan | Angka  | 97          |
|  |   |  |        |             |
|  |   |  |        |             |

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026.

### 3.3.Program dan Kegiatan

Sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah.

Adapun untuk penyusunan Program, Kegiatan, Sub kegiatan pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (Enam) program, yang terdiri dari : 1 ( satu ) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan 5 ( lima ) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 ( Tujuh ) kegiatan penunjang, dan 6 ( Enam ) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- 3) Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan, yang terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan penunjang, dan 14 (Empat Belas) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 disertai indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | INDIKATOR | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|-----------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |           |        |
| 2              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR |           |        |
| 2              | 18                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL                               |           |        |
| 2              | 18                              | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           |           |        |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja                             |           |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | INDIKATOR   | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |   |             |
|                |                                 |         |          |              | Perangkat Daerah   |   |             |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD  | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD   | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD  | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD   | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0006         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.01     | 0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah  |   |             |
| 2              | 18                              | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan |
| 2              | 18                              | 01      | 2.02     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD  | Laporan     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.02     | 0006         | Pengelolaan dan Penyiapan<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                                    | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan  | Dokumen     |
| 2              | 18                              | 01      | 2.02     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD                  | Laporan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | INDIKATOR   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                             |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     | 0001         | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Disiplin Pegawai                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     | 0002         | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                     | Paket   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     | 0003         | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                        | Dokumen |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     | 0010         | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang- Undangan                             | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang- Undangan                   | Orang   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.05     | 0011         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan  | Orang   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                    |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   | Paket   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan   | Paket   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                               | Paket   |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     | 0006         | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan           | Dokumen |
| 2              | 18                              | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Laporan |
| 2              | 18                              | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.07     | 0002         | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Disediakan                   | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.07     | 0005         | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan   | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.07     | 0010         | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.07     | 0011         | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung                       | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung  | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | INDIKATOR   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |   |         |
|                |                                 |         |          |              | Kantor atau Bangunan Lainnya   | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah  |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat  | Laporan |
| 2              | 18                              | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan                      | Laporan |
| 2              | 18                              | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan  | Laporan |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  |   |         |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     | 0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya   | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     | 0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Perizinannya   | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     | 0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     | 0010         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi           | Unit    |
| 2              | 18                              | 01      | 2.09     | 0011         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | Unit    |
| 2              | 18                              | 02      |          |              | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN IKLIM<br/>PENANAMAN MODAL</b>  |   |         |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     |              | Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Dibidang<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota    |   |         |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penetapan Kebijakan Daerah<br>Mengenai Pemberian<br>Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan Penanaman Modal                      | Jumlah Peraturan<br>Daerah/Provinsi dalam<br>Pembrian Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan Penanaman Modal         | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Kemitraan yang<br>dilakukan oleh Pemerintah   | Jumlah Kesepakatan Kemitraan<br>antara Usaha Besar  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | INDIKATOR  | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |  |                |
|                |                                 |         |          |              | Kabupaten/Kota   | (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah   |                |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     |              | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |  |                |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Dokumen        |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Dokumen        |
| 2              | 18                              | 03      |          |              | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   |  |                |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |  |                |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     | 0002         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   | Dokumen        |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota   | Dokumen        |
| 2              | 18                              | 04      |          |              | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   |  |                |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     |              | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |                |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Dokumen        |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0006         | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik         | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0007         | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang  | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,  | Kegiatan Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | INDIKATOR   | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |   |                |
|                |                                 |         |          |              | perizinan berusaha berbasis risiko   | evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha   |                |
| 2              | 18                              | 05      |          |              | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL  |   |                |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     |              | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0004         | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya  | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya   | Kegiatan Usaha |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0005         | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0006         | Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha |
| 2              | 18                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN<br>DATA DAN SISTEM<br>INFORMASI PENANAMAN<br>MODAL   |   |                |
| 2              | 18                              | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |   |                |
| 2              | 18                              | 06      | 2.01     | 0002         | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  | Dokumen        |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KETAPANG**

Berdasarkan analisa kebutuhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025 menetapkan 6 (Enam) program, Tiga Belas (Tiga Belas) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka secara garis besar proyeksi total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp . 10.956.065.761,- yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.975.384.437,-
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 260.593.068,-
- c. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 1.327.519.168,-
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 808.329.472,-
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 438.179.712,-
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 146.059.904,-

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 yang menampilkan rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana anggaran beserta prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025                    |                        |                               |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |   | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                     |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3   | 4                                     | 5                      | 6                             | 7                               | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN LADENGAN PELAYANAN DASAR    |   |                                       |                        | 10.956.065.761,-              |                                 |                 |                                   | 10.113.613.627,00               |
|      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                 |   |                                       |                        | 10.956.065.761,-              |                                 |                 |                                   | 10.113.613.627,00               |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |   |                                       |                        | 7.975.384.437,-               |                                 |                 |                                   | 6.743.500.000,00                |
|      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           |   |                                       |                        | 77.000.000,00                 |                                 |                 |                                   | 82.000.000,00                   |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah     | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua | 3 Dokumen              | 8.000.000,00                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI |                 |                                   | 8.000.000,00                    |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan       | Rencana Tahun 2025   |  |                               |               | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|---|--|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                             | 7             | 8                                    | 9                                 | 10                              |
|      |  |   | Kel/Desa   |  |                               | UMUM          |                                      |                                   |                                 |
|      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                     | 3.000.000,00  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 3.000.000,00                    |
|      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                     | 0,00          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 2.000.000,00                    |
|      |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                     | 3.000.000,00  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 3.000.000,00                    |
|      |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                     | 2.000.000,00  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 2.000.000,00                    |
|      |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan                       | Kab. Ketapang, Semua                           | 3 Laporan                     | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-                  |                                   | 25.000.000,00                   |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|---|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |   |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Kecamatan, Semua Kel/Desa                      |                        |                               | DANA ALOKASI UMUM                    |                 |                                   |                                 |
|      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan              | 36.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 36.000.000,00                   |
|      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |                        | 4.557.000.000,00              |                                      |                 |                                   | 4.618.000.000,00                |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35 Orang/bulan         | 4.788.550.702,00              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 4.600.000.000,00                |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 8.500.000,00                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 9.000.000,00                    |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan    | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua          | 1 Laporan              | 8.500.000,00                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI      |                 |                                   | 9.000.000,00                    |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan        | Rencana Tahun 2025  |  |                               |               | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|--|---|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             | 7             | 8                                    | 9                                 | 10                              |
|      |  | Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD                    | Kel/Desa  |  |                               | UMUM          |                                      |                                   |                                 |
|      |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |   |  | 95.400.000,00                 |               |                                      |                                   | 185.000.000,00                  |
|      |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai      | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai         | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit                        | 0,00          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 5.000.000,00                    |
|      |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                       | 0,00          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 25.000.000,00                   |
|      |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                     | 5.000.000,00  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                   | 5.000.000,00                    |
|      |  | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua          | 100 Orang                     | 40.400.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI      |                                   | 100.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      |  |  | Kel/Desa                                       |                        |                               | UMUM                                 |                 |                                   |                                 |
|      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Orang                | 50.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 50.000.000,00                   |
|      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |  |                        | 670.000.000,00                |                                      |                 |                                   | 477.000.000,00                  |
|      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 15.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 7.000.000,00                    |
|      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 270.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 150.000.000,00                  |
|      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 35.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 20.000.000,00                   |
|      | Penyelenggaraan Rapat  | Jumlah Laporan   | Kab.   | 1 Laporan              | 350.000.000,00                | DANA                                 |                 |                                   | 300.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      |                        |                               | TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM      |                 |                                   |                                 |
|      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |  |  |                        | 1.150.000.000,00              |                                      |                 |                                   | 710.000.000,00                  |
|      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit                 | 650.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 500.000.000,00                  |
|      | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit                 | 0,00                          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 10.000.000,00                   |
|      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit                 | 400.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 150.000.000,00                  |
|      | Pengadaan Sarana dan   | Jumlah Unit Sarana dan   | Kab.   | 5 Unit                 | 100.000.000,00                | DANA                                 |                 |                                   | 50.000.000,00                   |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                | Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      |                        |                               | TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM      |                 |                                   |                                 |
|      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |  |  |                        | 638.433.735,00                |                                      |                 |                                   | 485.000.000,00                  |
|      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 5.000.000,00                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 5.000.000,00                    |
|      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 312.633.735,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 160.000.000,00                  |
|      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 320.800.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 320.000.000,00                  |
|      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                 |  |  |                        | 539.000.000,00                |                                      |                 |                                   | 186.500.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|---|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |   |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Urusan Pemerintahan Daerah  |  |  |                        |                               |                                      |                 |                                   |                                 |
|      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                | 100.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 55.000.000,00                   |
|      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                | 4.000.000,00                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 6.500.000,00                    |
|      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit                 | 400.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 100.000.000,00                  |
|      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                | 20.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 15.000.000,00                   |
|      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau   | Kab. Ketapang,                                 | 10 Unit                | 15.000.000,00                 | DANA TRANSFER                        |                 |                                   | 10.000.000,00                   |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |   |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya   | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                |                        |                               | UMUM-DANA ALOKASI UMUM               |                 |                                   |                                 |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  |   |  |                        | 260.593.068,00                |                                      |                 |                                   | 393.270.958,00                  |
|      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                        | 104.298.170,00                |                                      |                 |                                   | 153.270.958,00                  |
|      | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemebrian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 49.754.400,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 75.000.000,00                   |
|      | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                  | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen              | 54.543.770,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 78.270.958,00                   |
|      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   |   |  |                        | 156.294.898,00                |                                      |                 |                                   | 240.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|---|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota    | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 85.000.000,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 110.000.000,00                  |
|      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                  | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 71.294.898,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 130.000.000,00                  |
|      |  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  |  |                        | 1.327.519.168,00              |                                      |                 |                                   | 1.420.145.126,00                |
|      |  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |                        | 1.327.519.168,00              |                                      |                 |                                   | 1.420.145.126,00                |
|      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                  | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 1.032.519.168,00              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 1.170.145.126,00                |
|      | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                              | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,                | 1 Dokumen              | 295.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA              |                 |                                   | 250.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      |  |  | Semua Kel/Desa                                 |                        |                               | ALOKASI UMUM                         |                 |                                   |                                 |
|      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  |  |  |                        | 808.329.472,00                |                                      |                 |                                   | 901.245.946,00                  |
|      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |                        | 808.329.472,00                |                                      |                 |                                   | 901.245.946,00                  |
|      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 130.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 50.000.000,00                   |
|      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1000 Pelaku Usaha      | 238.329.472,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 381.245.946,00                  |
|      | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,                | 0 Pelaku Usaha         | 160.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA              |                 |                                   | 170.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025                             |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |   |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                      | 6                             | 7                                    | 8               | 9                                 | 10                              |
|      |   | Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   | Semua Kel/Desa                                 |                        |                               | ALOKASI UMUM                         |                 |                                   |                                 |
|      | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko              | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Kegiatan Usaha      | 280.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 300.000.000,00                  |
|      |   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  |  |                        | 438.179.712,00                |                                      |                 |                                   | 491.588.698,00                  |
|      |   | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |  |                        | 438.179.712,00                |                                      |                 |                                   | 491.588.698,00                  |
|      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Kegiatan Usaha       | 98.179.712,00                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 111.588.698,00                  |
|      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha  | Jumlah Pelaku Usha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis   | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,                | 50 Pelaku Usaha        | 170.000.000,00                | DANA TRANSFER UMUM-DANA              |                 |                                   | 190.000.000,00                  |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Rencana Tahun 2025  |  |                               |  | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026              |                                 |                |                                      |  |                |
|------|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|----------------|
|      |  |  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana  |  | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                |                                      |  |                |
| 1    | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             | 7  | 8  | 9  | 10                              |                |                                      |  |                |
|      |  | Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Semua Kel/Desa  |  |                               | ALOKASI UMUM   |  |  |                                 |                |                                      |  |                |
|      |  | Pengawasan Penanaman Modal                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Kegiatan Usaha             | 170.000.000,00   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM   |  | 190.000.000,00                  |                |                                      |  |                |
| 2    | 18   | 06   |   |  |                               | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  |  |  | 146.059.904,00                  | 163.862.899,00 |                                      |  |                |
| 2    | 18   | 06   | 2   |  |                               | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |  |  | 146.059.904,00                  | 163.862.899,00 |                                      |  |                |
| 2    | 18   | 06   | 01  | 0002   |                               | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                       | 146.059.904,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  | 163.862.899,00 |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 antara lain:

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2) Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .;
- 3) Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini memuat antara lain :

- 1) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025;
- 2) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ketapang;
- 3) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
- 2) Program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- 3) Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Ketapang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program

dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Tahun Anggaran 2025.

Ketapang, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Ketapang



( **Drs. MARWANNOR, MM** )

NIP. 19670427 200003 1 003